

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko Slamet Surjoputro, 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muda Markus, 2005, *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Samudra Azhari, 2005, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: PT Grasindo.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan 99 Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

C. Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Christina Irwati Tanan, 2021, *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura*, Vol 4, No.1.

Dhuratun Nuskha, Februari 2021, *Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan*

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) (Studi Kasus Pada Kpp Malang Utara), Vol. 10 No. 06.

Dhimam Zidny Siradj, Mei 2011, *Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019*, Vol 4 No.3.

D. Sumber Lainnya

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/> diakses pada 11 Juni 2022 pukul 23.15 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6047413/9-bulan-pajak-kendaraan-samsat-kelapa-dua-digelapkan-mi-kata-pimpinannya/2> diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.08

